

MENGGAGAS KERANGKA KERJA MANAJEMEN HUMAS DALAM TINJAUAN AKSILOGI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN

Ahmad Syarifi Hidayat

MTs KH. A. Wahid Hasyim, Bangil, Pasuruan

Email : syarifi164@gmail.com

DOI: <http://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.657>

Received: September 2019

Revised: November 2019

Approved: Desember 2019

Abstract :

This research presents a public relations management framework in axiology review in educational institutions, where the framework has an important role in building and enhancing cooperation between schools and stake holders, guardians of students, government and other institutions to meet the needs of the institution. This research uses a qualitative with library research. The results showed that the implementation of public relations management functions, such as planning, organizing, actuating, and evaluating will be achieved when accompanied by optimal performance of public relations practitioners. But it is not enough on the performance of an individual, public relations management in axiology review applied in schools must apply the code of conduct, the code of profession, the code of publication, the code of enterprise. To be able to implement this, it is expected that professionals in the public relations field have the ability qualifications, namely; ethical sensibility, ethical reasoning, ethical conduct, and ethical leadership.

Key words : Framework, Public Relations Management, Axiology

Abstrak

Penelitian ini menyajikan tentang kerangka kerja manajemen humas dalam tinjauan aksiologi pada lembaga pendidikan, di mana kerangka kerja tersebut memiliki peran penting dalam membangun dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan para stake holders, wali murid, pemerintah dan lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis library research. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen humas, seperti planning, organizing, actuating, dan evaluating akan tercapai manakala disertai dengan kinerja optimal dari praktisi humas. Akan tetapi tidak cukup pada kinerja an sich, manajemen humas dalam tinjauan aksiologi yang diterapkan di sekolah harus menerapkan code of conduct, code of profession, code of publication, code of enterprise. Untuk dapat menerapkan hal tersebut, diharapkan para profesional di bidang humas memiliki kualifikasi kemampuan, yaitu; kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility), kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning), memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis, kemampuan untuk berperilaku secara etis (ethical conduct), dan kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (ethical leadership).

Kata Kunci : Kerangka Kerja, Manajemen Humas, Aksiologi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu fondasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia utamanya untuk menjaga serta mengembangkan Negara Indonesia (Munif, 2016), karena Pendidikan dapat membentuk watak kepribadian seseorang dalam berbangsa dan bernegara serta dapat menjadi penentu bagi keberhasilan bidang yang lain seperti politik (Hefniy, 2017), ekonomi dan lain sebagainya, sebab manusia itu sendiri merupakan subjek yang terlibat dalam seluruh aktifitas pada bidang-bidang tersebut (Hasan Agus R, 2016).

Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (Indrayani, 2016). Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut, maka perlu adanya suatu kerjasama dengan melibatkan elemen-elemen yang berpengaruh terhadap kemajuan sekolah baik itu dari masyarakat, serta pada lingkungan sekolah dengan secara optimal untuk membantu dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwasanya; “disarankan agar suatu lembaga pendidikan untuk menjalin hubungan ataupun kerjasama dengan lingkungan dan masyarakat yang ada disekitar sekolah” (Sholeh, 2017). Sesuai dengan konsep tersebut, pendidikan itu masalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat, namun menurut Kaufman “pendidikan tidak hanya terdiri dari 3 komponen tersebut melainkan para guru, siswa, orang tua serta masyarakat” (Nudin, 2015).

Fenomena yang ada dalam instansi lembaga pendidikan menggambarkan bahwa hubungan masyarakat sebagai bagian dari organisasi yang ada pada sekolah-sekolah ataupun madrasah hanya sebagai pelengkap semata yang seakan-akan tidak memiliki fungsi ataupun nilai di dalamnya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan struktur organisasi yang ada pada sekolah hanya memajang ataupun menempel jabatan Wakil Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada struktur lembaga tersebut, namun tidak disertai dengan kerangka kerja yang benar dan dijalani sebagaimana tupoksi yang berlaku pada system pendidikan. Padahal, peran humas sangat besar dalam menjalin kerjasama dengan mitra sekolah atau madrasah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Terdapat beberapa penelitian tentang humas pada lembaga pendidikan, diantaranya Abrori (2018) yang menyatakan bahwa “humas” atau *public relation* memiliki peran sebagai *method of commucation* dalam membentuk citra madrasah, sehingga perlu dioptimalkan guna meningkatkan nilai *competitive advantage* madrasah. Hannah Mahfuzhah (2018) menyampaikan bahwa untuk memenangkan persaingan dalam dunia pendidikan, maka humas harus inovatif dan kreatif dalam memilih dan menentukan media publikasi lembaga.

Berangkat dari hal tersebut, optimalisasi peran humas dalam lembaga pendidikan sangatlah penting. Humas bukan sekedar katalisator organisasi *an sich* (Burhan Nudin, 2015), akan tetapi lebih dari itu, humas merupakan

kerangka kerja untuk mengefektifkan organisasi dalam berinteraksi dengan mitranya, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, tulisan ini menyajikan tentang bagaimana memahami kerangka kerja humas serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada lembaga pendidikan.

Manajemen Humas dalam Lembaga Pendidikan

Manajemen diidentikkan dengan istilah pengelolaan, pengurusan, ketatausahaan, pembinaan, ketatalaksanaan, serta ketatapengurusan (Sastrohadiwiryono, 2002). Eksistensi manajemen dalam aktivitas organisasi memiliki peranan penting dalam pengembangan organisasi untuk selanjutnya. Manajemen dipahami sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi (Siswanto, 2004). Manajemen merupakan suatu proses, ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan organisasi dengan segala aspeknya, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lembaga dalam bentuk apapun memerlukan manajemen untuk menjalankan semua aktivitas dan roda kegiatan secara terarah, sistematis dan tepat sasaran.

Manajemen pada umumnya merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang seefisien dan seefektif mungkin (Syamsuddin, 2017). Demikian pula halnya jika dikaitkan dengan humas atau *public relation*.

Sedangkan *public relations* adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi demi kepentingan publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya (Cutlip, 2005).

Pada dasarnya humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer sampai dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kebutuhan dan kehadiran humas tidak dapat dicegah, terlepas dari suka ataupun tidak suka, karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan keberlangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting humas sebagai sumber informasi semakin kita rasakan pada era globalisasi seperti saat ini.

Humas merupakan terjemahan bebas dari istilah *public relation* atau PR, kedua istilah ini digunakan secara bergantian, yang terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara lembaga ataupun organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Setiap orang pada dasarnya mengenal dan mempraktikkan fungsi humas, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan makhluk lain

untuk pemecahan kebutuhan hidupnya. Istilah dasar ini sering kali kabur dan tidak dipahami oleh semua orang.

Humas dipahami sebagai *the management of communication between an organization and its public* (Aronov, 1997). Dalam hal ini, humas merupakan komunikasi antara organisasi dengan public secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dari tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama (Rosady, 2002). Kegiatan humas atau *public relation* pada hakekatnya adalah komunikasi. Komunikasi menurut Effendi (1986) dimaknai sebagai penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung (melalui media). Sejalan dengan definisinya, maka secara konseptual dan metodologis, fungsi humas ialah sama pada semua organisasi, yakni berupaya membina hubungan harmonis melalui system saluran komunikasi dua arah dengan publik agar tercapainya opini dan persepsi yang positif, dan untuk memperoleh citra organisasi yang baik.

Sementara ini fenomena yang terjadi pada manajemen humas yang ada pada lembaga pendidikan, rata-rata hanya berjalan sebagai sebuah “bumbu” dan pelengkap saja, utamanya dalam struktural lembaga pendidikan yang memang menjadi kewajiban adanya wakil kepala bidang kehumasan. Humas yang ada pada lembaga pendidikan atau organisasi, terkadang hanya dipandang sebelah mata dan difungsikan sebagai pengantar surat, baik surat kepada wali murid hingga kepada guru, ataupun instansi yang lainnya. Sedangkan secara struktural, *public relation* (humas) merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan dan bukan suatu fungsi atau bagian yang berdiri sendiri, di mana humas merupakan penyelenggara komunikasi timbal balik antara suatu lembaga. Komunikasi seperti ini ditujukan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya tujuan, kebijakan dan tindakan lembaga tersebut.

Dengan kata lain, *public relation* berfungsi untuk menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan pengertian dan kemasam baik publiknya, serta memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan yang baik dengan publik.

Aksiologi dalam Filsafat Ilmu

Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu *axios*, yang berarti layak atau pantas, dan *logos* yang berarti ilmu atau studi mengenai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jujun S. Suriasumantri (1998) mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

Pembahasan aksiologi ditujukan untuk memahami batas arti, criteria, tipe serta status epistemologis dari sebuah nilai-nilai. aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh (Bahrum, 2013). Aksiologi juga memiliki arti ajaran tentang nilai dan system nilai dalam ilmu filsafat, serta juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat sebuah nilai" (Harini, 2014).

Aksiologi disebut juga dengan teori nilai, karena aksiologi dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab pertanyaan yang amat mendasar, yaitu bagaimana manusia harus hidup dan bertindak?, Yang pada akhirnya, teori nilai ini melahirkan sebuah konsep tentang etika dan estetika. Secara moral, aksiologi dalam pandangan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas kemaslahatan dan kesejahteraan umat pada perkembangan keilmuan. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan apa yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan seseorang, kualitas dan harga dari sesuatu atau *appreciative respons* (Adib, 2010). Sebagai bagian dari filsafat, aksiologi membahas tentang nilai dari suatu ilmu pengetahuan, yang merupakan alat (*means*) bukan tujuan (*ends*). Subtansi nilai sesuatu bergantung pada tujuannya. Maka pembahasan tentang nilai pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari tujuannya (Sanprayogi, 2017).

Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat; sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana (Abadi, 2016). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa aksiologi merupakan teori tentang nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari sebuah pengetahuan yang diperoleh.

Dalam aksiologi, terdapat dua penilaian yang umum digunakan, yaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah-satu cabang filsafat tertua (Abadi, 2016). Setidaknya ia telah menjadi pembahasan menarik sejak masa *Sokrates* dan para kaum *shopis*. Di situ dipersoalkan mengenai masalah kebaikan, keutamaan, keadilan dan sebagainya. Etika sendiri dipahami diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Isi dari pandangan-pandangan moral ini sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah norma-norma, adat, wejangan dan adat istiadat manusia. Berbeda dengan norma itu sendiri, etika tidak menghasilkan suatu kebaikan atau perintah dan larangan, melainkan sebuah pemikiran yang kritis dan mendasar. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggung jawabkan apa yang ia lakukan (Franz Magnis Suseno, 2010).

Sedangkan kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan, berkenaan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, tak dapat dibantah lagi bahwa kedua ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, dengan ilmu seseorang dapat mengubah wajah dunia. Nilai kegunaan ilmu, untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, yaitu; pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu.

Kedua, Filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu didepan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas, penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia.

Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif, apabila subjek berperan dalam memberi penilaian; kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian (S.Suriasumantri, 1998). Dengan demikian, nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang.

Salah satu faktor yang membedakan antara pernyataan ilmiah dengan anggapan umum ialah terletak pada objektivitasnya. Seorang ilmuan harus melihat realitas empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat idiologis, agama dan budaya. Seorang ilmuan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Ketika seorang ilmuan bekerja dia hanya tertuju kepada proses kerja ilmiah dan tujuannya agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya, dia tidak mau terikat pada nilai subjektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis *library research*. Penelitian jenis *library research* ini merupakan serangkaian aktivitas yang berkenaan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Teknik analisis datanya menggunakan *content analysis*, yaitu metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur guna menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis terkait dengan kerangka kerja manajemen humas dalam tinjauan aksiologi pada lembaga pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kerja Manajemen Humas dalam tinjauan Aksiologi pada Lembaga Pendidikan

Sebagai bagian terpenting dari filsafat, aksiologi merupakan persoalan fungsi, nilai, tujuan dan manfaat dari sebuah ilmu (Fanani, 2009). Dalam kaitannya dengan humas, muncul pertanyaan mengapa dan untuk apa humas perlu diadakan di dalam lembaga pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan yang sedemikian ini, tentunya tidak akan lepas dari fungsi dan peran humas (*public relations*) dalam lembaga pendidikan itu sendiri, membangun hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan orang tua, masyarakat, lingkungan, serta institusi.

Kegiatan kehumasan perlu dikelola dengan baik dengan memanfaatkan ilmu manajemen, karena manajemen merupakan media untuk mengelola humas dengan baik melalui beberapa kerangka kerjanya. Adapun kerangka kerja manajemen humas tersebut adalah; *planning*, Perencanaan merupakan sebuah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi. *Planning* merupakan proses penetapan sasaran serta tindakan yang diperlukan dalam pencapaian sasaran. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai pembuatan suatu target yang akan diraih pada masa depan (Septuri, 2016).

Kemudian Perencanaan dalam tinjauan aksiologi dapat dijelaskan melalui tujuan, manfaat serta untuk apa fungsi perencanaan pada manajemen humas (*public relations*) (Septuri, 2016). Tujuan *planning* pada manajemen humas diantaranya sebagai standart dalam pengawasan, untuk dapat mengetahui terkait dengan kapan akan dilaksanakan suatu kegiatan dan kapan selesainya. Begitupula dengan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan agar supaya kegiatan humas sistematis dan efektif, meminimalisir dan memangkas program kegiatan yang bersifat tidak produktif. Di samping itu untuk mendeteksi kesulitan dan hambatan yang didapatkan selama

pelaksanaan serta untuk dapat mengarahkan kepada pencapaian suatu tujuan.

Kerangka kerja manajemen humas yang kedua ialah *organizing* yang artinya pengorganisasian. *Organizing* merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan ataupun wewenang dan sumberdaya pada suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Jailani, 2018). Pengorganisasian di sini dilakukan dengan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil, sehingga sangat mempermudah manajer (pimpinan) dalam mengelolah setiap proses pada program kegiatan yang dirancang.

Fungsi pengorganisasian meliputi; (1) perancangan tanggung jawab, kewenangan pada masing-masing personal, (2) penetapan jabatan-jabatan yang dikelompokkan berdasarkan bagian-bagian tertentu. Sedangkan hasil dari fungsi *organizing* berupa struktur organisasi. Adapun proses yang dilakukan oleh humas dalam fungsi manajemen (*organizing*) meliputi; penentuan staf yang merupakan kegiatan pemusatan pada manajemen SDM (sumber daya manusia), proses kepemimpinan terhadap bagian atau divisi yang ada di bawahnya sebagai proses pemberian motivasi dan bentuk pengendalian program.

Sedangkan tinjauan aksiologi tentang fungsi manajemen *organizing* dapat dijelaskan melalui tujuan dan manfaat dengan adanya manajemen *organizing* dalam suatu lembaga pendidikan. Fungsi pengorganisasian dalam hal ini yaitu; 1) Sebagai penentu sumberdaya beserta kegiatan yang diperlukan untuk menuju tujuan organisasi tersebut, 2) sebagai proses perencanaan dan pengembangan organisasi, 3) sebagai penguasaan tanggung jawab tertentu, 4) sebagai pendelegasian wewenang yang dibutuhkan bagi personal dalam menjalankan tugas-tugasnya (Septuri, 2016).

Manfaat *organizing* dalam manajemen humas (*public relations*); (a) Untuk dapat mengatasi terbatasnya kemauan, kemampuan serta sdm yang dimiliki, (b) Untuk mencapai tujuan yang lebih efisien dan efektif, (c) Sebagai wadah dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, (d) Sebagai suatu wadah yang mengembangkan potensi serta spesialisasi yang dimiliki oleh personal, (e) Sebagai wadah dalam pembagian tugas kerja, (f) Sebagai wadah dalam mencari keuntungan bersama, (g) Sebagai wadah dalam mengelola lingkungan dengan bersama-sama, (h) Sebagai wadah dalam penggunaan kekuasaan & pengawasan, (i) Sebagai wadah untuk menambah pergaulan (social), (j) Sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kerangka kerja yang ketiga yakni *actuating* (pelaksanaan), *actuating* (pelaksanaan) merupakan sebuah kegiatan yang menggerakkan serta mengusahakan diri dalam melakukan tugas dan kewajiban bagi para personalia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dan selalu berkomunikasi serta berhubungan dengan masyarakat dengan baik.

Kerangka kerja yang ketiga yaitu *actuating* (pelaksanaan). *Actuating* merupakan sebuah kegiatan yang menggerakkan serta mengusahakan diri dalam melakukan tugas dan kewajiban bagi para personalia yang sesuai

dengan kemampuan dan keahliannya dan selalu berkomunikasi serta berhubungan dengan masyarakat secara baik.

Actuating merupakan kegiatan yang paling penting dalam manajemen humas setelah melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian. Dalam sudut pandang aksiologi diwujudkan dalam bentuk pengerahan personal guna melaksanakan suatu program kegiatan yang sesuai dengan *planning* dan *organizing* untuk mencapai tujuan dalam manajemen humas pada organisasi pendidikan.

Sedangkan kerangka kerja keempat, yaitu *evaluating*. Kegiatan ini memiliki makna menilai semua kegiatan yang berlangsung untuk menemukan indikator yang menjadi penyebab berhasil atau tidaknya suatu tujuan atau suatu kegiatan tertentu, sehingga hasil dari evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar pengembangan program berikutnya (Rumui, 2016).

Evaluasi sebagai media pengawasan organisasi ditujukan untuk menghentikan atau menghilangkan masalah, penyelewengan, pemborosan, penyimpangan dan hambatan, untuk mencegah terulangnya kesalahan dan hambatan yang pernah terjadi sebelumnya.

Etika Profesi dalam Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan

Dalam prinsip-prinsip etika profesi, seseorang dalam menjalankan tugas serta kewajiban tentunya selalu berhubungan erat dengan teori *code of profession* (kode etik profesi) dan *code of conduct* (kode perilaku), sebagai sebuah standar moral, dan tolak ukur seseorang di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, kerangka kerja manajemen humas yang ditinjau melalui perspektif aksiologi, tentunya tidak akan lepas dari nilai ataupun etika di dalam menjalankan segalanya, termasuk dalam menjalankan 4 macam fungsi manajemen humas pada lembaga pendidikan.

Seseorang yang diberi amanah untuk menjadi Wakil Kepala bagian Hubungan Masyarakat pada lembaga pendidikan diharapkan mampu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan serta mengevaluasi program-program kehumasannya dengan baik. Dalam perspektif aksiologi, pimpinan tersebut harus dapat menjalankan serta menerapkan dengan baik *code of profession* dan *code of conduct* dalam melakukan komunikasi dan interaksi dengan mitra lembaga, yaitu masyarakat, wali murid, pemerintah dan pengguna lulusan. Oleh sebab itu, nilai (etika) menjadi sangat penting dan bahkan menjadi bagian vital dari manajemen humas karena menjadi salah satu faktor penentu dalam meraih keberhasilan dan kemajuan pada lembaga pendidikan dalam membangun dan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan hukum. Etika berbeda dengan teologi moral karena bersandar pada kaidah-kaidah keagamaan, tetapi terbatas pada pengetahuan yang dilahirkan tenaga manusia sendiri. Etika humas atau *public relations* merupakan ilmu

pengetahuan yang mengkaji tentang asas-asas akhlak atau moral yang baik dan yang buruk, dan hak serta kewajiban moral yang dilakukan atau diterapkan oleh praktisi *public relations* (Zuhri, 2007).

Etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik serta aspek-aspek hukum yang mengatur peran dan fungsi humas sebagai penyandang profesi terhormat, harus memiliki kode etika perilaku, yang meliputi; pertama, *code of conduct*, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. Kedua, *code of profession*, merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara professional. Ketiga, *code of publication*, merupakan standar moral dan yuridis etis dalam melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik. Keempat, *code of enterprise*, menyangkut aspek hukum perizinan dalam menegakkan aturan yang ada (Adib, 2010).

Etika profesi humas tersebut merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi humas. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para professional di bidang humas memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti; Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan untuk berpikir secara etis (*ethical reasoning*), memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis, kemampuan untuk berperilaku secara etis (*ethical conduct*), dan kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (*ethical leadership*)

Kesimpulan

Manajemen humas merupakan kebutuhan pada lembaga pendidikan, karena fungsi dari peran *public relations* mampu menghasilkan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, masyarakat, lingkungan, serta institusi (lembaga ataupun organisasi) lain yang bertujuan untuk memperkuat jalinan kerjasama dan pemenuhan kebutuhan sekolah.

Dalam praktiknya, kerangka kerja humas pada lembaga pendidikan harus didasarkan pada etika profesi dan nilai yang berlaku dalam komunitas organisasi dan lingkungan yang mengitarinya. Etika dan nilai profesi kehumasan pada lembaga pendidikan harus dijunjung tinggi oleh praktisi humas agar supaya tujuan pengelolaan humas dalam perspektif aksiologi dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan harapan semua pihak yang ada pada organisasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *KANAL (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 4(2), 187–204.
- Abrori, H. (2018). Humas sebagai Method of Communication dalam Membentuk Image Madrasah. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 160–166.
- Adib, M. (2010). *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahrum. (2013). Akhirnya Manusia Adalah Makhluk Pencari Kebenaran. *Jurnal Sulesana*, 8(2), 35–45.
- Burhan Nudin. (2015). *Manajemen Humas dalam Peningkatan Pengelolaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan Sleman*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno. (2010). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hannah Mahfuzhah, A. (2018). Media Publikasi Humas dalam Pendidikan. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 137–149.
- Harini, I. N. (2014). Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pencitraan Sekolah (Studi Kasus di SMP Al-Hikmah Surabaya). *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4), 8–20.
- Hasan Agus R, A. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Brain Based Education. *Jurnal Pedagogik*, 3(2), 13–23.
- Hefniy. (2017). Membangun Pendidikan Berbasis Islam Nusantara (Pendidikan Berbasis Karakter atau Akhlakul Karimah?). *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 36–42.
- Indrayani, H. (2016). Etika Advokasi Public Relations dalam Manajemen Krisis Reputasi. *Jurnal Interaksi*, 5(1), 68–77.
- Jailani. (2018). Kerangka Kerja Manajemen Humas dalam Lembaga Pendidikan. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 49–63.
- Munif, M. (2016). Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah. *Jurnal Pedagogik*, 3(2), 46–57.
- Rumui, E. (2016). Analisis Isi mengenai Pelanggaran Kode Etik Profesi Public Relations dalam Film Thank You for Smoking. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1), 1–12.
- Sanprayogi, M. (2017). Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan Keterkaitan Ilmu dengan Filsafat. *Al-Murabbi*, 4(1), 105–120.
- Septuri. (2016). Konsep Manajemen Pendidikan Islam: Sebuah Analisis Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Konsep Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Idarah Jurnal Kependidikan Islam*, 6(1), 62–93.
- Sholeh, M. (2017). Kajian Kritis Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Kajian. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 36–55.

Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

E-ISSN: 2549-5720 P-ISSN: 2549-3663

Vol. 03 No. 02 (2019) : 97-108

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim>

Syamsuddin. (2017). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Idaarah*, 1(1), 3-4.

Zuhri, S. (2007). *Etika Profesi Public Relation*. Surabaya.